

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2015**



**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
KABUPATEN BANYUMAS**

**Jl. Jend. Sudirman No.540 Kode Pos 53116
Telp/Fax. 0281-627965
PURWOKERTO**

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan yang ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2015. Penyusunan LKjIP tahun 2015 pada hakekatnya adalah upaya untuk memberikan penjelasan akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2015.

Visi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang menjadi tugas dan fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas periode tahun 2014 – 2018 adalah”

“ TERWUJUDNYA PELAYANAN PENANAMAN MODAL UNTUK MENDUKUNG KABUPATEN BANYUMAS YANG BERDAYA SAING”

Dari visi tersebut, dijabarkan dalam 3 misi. Agar visi dan misi tersebut lebih mudah di implementasikan maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Keberhasilan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas dalam mencapai tujuan dan sasaran diukur melalui capaian indikator kinerja.

Capaian kinerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan tahun 2015 direpresentasikan oleh capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | Capaian |
|----|---|--|--|--------------|
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal dan perizinan | Terwujudnya pelayanan penanaman modal dan perizinan yang prima, mudah, cepat, dan transparan | 1. Peningkatan Pelayanan perizinan 2. Mekanisme perizinan 3. Sosialisasi Penanaman Modal 4. Kajian prosedur pelayanan | 102 % |

| | | | | |
|--|--|---|--|--------------|
| 2 | Meningkatkan investasi dan peluang kerjasama investasi untuk meningkatkan lapangan kerja | Terbangunnya Kerjasama Penanaman Modal dan meningkatkan investasi serta tersediannya Data informasi peluang investasi | 1. Peningkatan promosi investasi 2. Peningkatan kerjasama Penanaman Modal dengan Stakeholders 3. Penyiapan potensi sumberdaya prasarana daerah | 102% |
| 3 | Meningkatkan nilai dan iklim investasi | Terpantaunya Pengembangan dan pengendalian penanaman modal | 1. Monev untuk Peningkatan nilai investasi | 203% |
| Rata – rata capaian kinerja sasaran | | | | 135 % |

Dengan capaian kinerja **yang rata-rata mencapai lebih dari 100%** (seratuspersen), maka capaian kinerja Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Tahun 2015 masuk dalam kategori sangat baik, karena telah melampaui target yang ditentukan.

Capaian kinerja tertinggi ada pada sasaran/ program **Peningkatan pengendalian dan pengembangan penanaman modal** dan *Program Peningkatan Kualitas Penanaman Modal* Capaian ini disumbangkan oleh capaian indikator kinerja dari kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan penanaman modal dan Kegiatan Pengkajian Prosedur Pelayanan Penanaman Modal, yang diampu oleh Bidang Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal, ha lini dikarenakan:

1. Masyarakat sudah banyak yang sadar betapa pentingnya dalam berusaha memiliki Surat Izin secara legal,

2. BPMPP terus berusaha memberi pelayanan terbaik dan prima kepada masyarakat dalam mengurus izin-izin usaha yang diperlukan.
3. Telah diterbitkannya perda tentang Penanaman Modal Daerah
4. Secara terus menerus melakukan kegiatan pementauan dan pengendalian penanaman modal melalui tinjauan langsung ke perusahaan-perusahaan
5. Secara terus menerus melakukan pengkajian prosedur dan persyaratan perizinan penanaman modal agar lebih sederhana dan tidak berbelit-belit.

Sedangkan, biaya yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja sebesar Rp. 1.360.574.909. dengan rincian sebagai berikut :

| NO. | PROGRAM | KEGIATAN | ANGGARAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | % |
|-----|---|--|-------------------|--|-------|
| 1. | Pelayanan Administrasi Perkantoran | | 1.355.750.000 | 1.102.161.018 | 81,30 |
| | | 1 Ketatausahaan | 1.355.750.000 | 1.102.161.018 | 81,30 |
| 2. | Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | | 300.000.000 | 281.156.450 | 93,72 |
| | | 1 Penyelenggaraan Promosi Investasi | 200.000.000 | 194.732.500 | 97,37 |
| | | 2 Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di bidang Penanaman Modal dengan Instansi pemerintah dan Dunia Usaha | 100.000.000 | 86.42 Penyiapan potensi sumberdaya prasarana daerah 3.950 | 86,42 |
| 3. | Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi | | 50.000.000 | 46.251.700 | 92,50 |
| | | 1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | 50.000.000 | 46.251.700 | 92,50 |

| | | | | | | |
|----------------|---|---|---|-------------------|-------------------|-------|
| 4 | Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah | | | 50.000. 000 | 45.130.200 | 90,26 |
| | | 1 | Penyusunan Buku Profil Potensi/ Peluang Investasi Daerah | 50.000. 000 | 45.130.200 | 90,26 |
| 5 | Program Peningkatan Pelayanan Perizinan | | | 445.000. 000 | 332.208.411 | 74,65 |
| | | 1 | Mekanisme Perizinan | 200.000.0 00 | 184.404.321 | 92,20 |
| | | 2 | Sosialisasi Penanaman Modal | 75.000. 000 | 32.966.150 | 43,95 |
| | | 3 | Kajian Prosedur Pelayanan | 75.000. 000 | 35.319.175 | 47,09 |
| | | 4 | Peningkatan Pelayanan Perizinan | 95.000. 000 | 79.518.765 | 83,70 |
| TOTAL ANGGARAN | | | | 2.200.750. 000 | 1.806.907. 779 | 82,10 |

Biaya paling besar dikeluarkan untuk membiayai capaian kinerja sasaran Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Investasi, biaya terendah dikeluarkan untuk membiayai sasaran peningkatan Kegiatan Sosialisasi Penanaman Modal, sedangkan efisiensi tertinggi penggunaan keuangannya sebesar 47 % dan terendah sebesar 43,95%

Melalui LKjIP Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas tahun 2015 ini, diharapkan bisa menjadi bahan perbaikan bagi pelaksanaan kebijakan dan program Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas tahun mendatang sesuai dengan rencana dan sasaran strategis daerah.

PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada dasarnya merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good government and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan satu tahun ke depan.

Penyusunan LKjIP Tahun 2015 Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LKjIP. Hasil pengukuran kinerja secara mandiri (self assessment) capaian kinerja Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas Tahun 2015 adalah 95%. Hasil tersebut menjadi cambuk bagi Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas untuk terus meningkatkan capaian kinerja satu tahun ke depan.

Akhirnya kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas Tahun 2013, semoga LAKIP ini akan bermafaat bagi peningkatan Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas, dan menjadi inspirasi koreksi yang konstruktif.

Purwokerto, Februari 2015

Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan
Kabupaten Banyumas

DRS. ASIS KUSUMANDANI, M.Hum

Pembina Tk,I

NIP. 19630405 198503 1 021

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| IKHTISAR EKSEKUTIF | i |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Tugas Pokok dan Fungsi BPMPP | 1 |
| C. Latar Belakang Penyusunan LKjIP | 6 |
| D. Dasar Hukum Penyusunan LKjIP | 6 |
| E. Sistematika Penyusunan LKjIP BPMPP | 7 |
| II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 8 |
| A. Perencanaan Kinerja | 8 |
| B. Perjanjian Kinerja | 12 |
| III. AKUNTABILITAS KINERJA | 15 |
| A. Pengukuran Kinerja | 15 |
| B. Analisis Hasil Pengukuran Kinerja | 26 |
| C. Akuntabilitas Keuangan | 30 |
| IV. PENUTUP | 33 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Badan Penanaman Modal Pelayanan Perijinan (BPMPP) Kabupaten Banyumas menjadi bagian penting dalam upaya pengurangan pengangguran keberadaan investasi dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, yang diharapkan mampu mengurangi jumlah penduduk miskin di kabupaten Banyumas.

Badan Penanaman Modal Pelayanan perijinan (BPMPP) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 27 tahun 2009 serta Perbup Nomor 27 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas merupakan landasan hukum bagi terbentuknya Badan Penanaman Modal Pelayanan Perijinan, memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan sebagian kewenangan daerah dalam rangka pelayanan administratif dalam proses pemberian perijinan kepada masyarakat oleh perangkat daerah yang terkait.

Badan Penanaman Modal Pelayanan perijinan (BPMPP) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sebagaimana visi dan misi yang telah dijabarkan dalam program kerja tahunan.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANAMAN MODAN DAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN BANYUMAS

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta menyelenggarakan penerbitan perijinan dan non perijinan sesuai peraturan perundang – undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut BPMPP mempunyai fungsi :

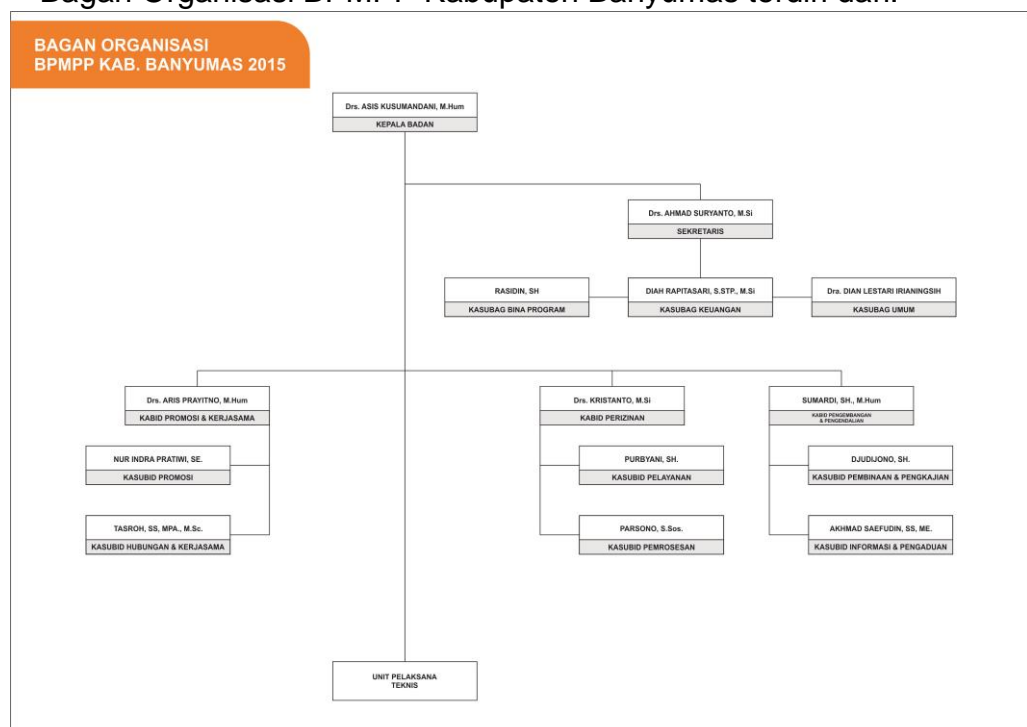
1. Perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
4. Pendokumentasian penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Susunan Organisasi BPMPP Kabupaten Banyumas terdiri dari:

- Kepala Badan
- Sekretariat, terdiri dari :
 - Sub Bagian Bina Program
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Umum
- Bidang Perizinan, terdiri dari :
 - Sub Bidang Pelayanan
 - Sub Bidang Pemrosesan
- Bidang Pengembangan dan Pengendalian, terdiri dari :
 - Sub Bidang Pembinaan dan Pengkajian
 - Sub Bidang Informasi dan Pengaduan
- UPT
- Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Organisasi BPMPP Kabupaten Banyumas terdiri dari:



PENJABARAN TUGAS SEKRETARIAT

- (1) Kepala Badan
Kepala Badan mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Sekretaris Badan
Sekretaris badan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta monitoring dan evaluasi kegiatan badan, pelayanan administrasi keuangan, dalam rangka penyelarasan dengan tujuan organisasi, administrasi surat menyurat dan kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, serta perlengkapan dan kerumahtanggaan guna terwujudnya sinkronisasi dalam menunjang pelaksanaan tugas Badan.
- (3) Kepala Subbagian Bina Program
Subbagian Bina Program mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta monitoring dan evaluasi kegiatan badan dalam rangka penyelarasan dengan tujuan organisasi
- (4) Kepala Subbagian Keuangan
Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku guna memperlancar ketersediaan dan tertib administrasi keuangan Badan.
- (5) Kepala Subbagian Umum
Kepala Subbagian Umum mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan administrasi surat menyurat dan kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, serta perlengkapan dan kerumahtanggaan guna kelancaran tugas urusan umum.

KEPALA BIDANG PROMOSI DAN KERJASAMA

- (1) Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama
Kepala bidang promosi dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, bahan perumusan materi fasilitasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi serta pengoordinasian penyelenggaraan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan promosi dan kerjasama penanaman modal guna terwujudnya iklim / peluang investasi yang baik.

- (2) Kepala Subbidang Promosi
Kepala Subbidang Promosi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervise dan konsultasi serta pelaksanaan penyelenggaraan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan promosi penanaman modal guna tercapainya target penanaman modal yang telah ditetapkan dan berkembangnya perekonomian daerah.
- (3) Kepala Subbidang Hubungan dan Kerjasama
Kepala Subbidang Hubungan dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervise dan konsultasi serta pelaksanaan penyelenggaraan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan yang berkaitan dengan hubungan dan kerjasama penanaman modal guna tercapainya iklim penanaman modal yang kondusif.

BIDANG PERIJINAN

- (1) Kepala Bidang Perijinan
Kepala Bidang Perijinan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, materi fasilitasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi serta pengoordinasian penyelenggaraan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan perijinan guna terwujudnya tertib hukum (legalitas) pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Subbidang Pelayanan
Kepala Subbidang Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi serta pelaksanaan penyelenggaraan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan perijinan berdasarkan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya tertib hukum (legalitas) bagi para penanaman modal.
- (3) Kepala Subbidang Pemrosesan
Kepala Subbidang Pemrosesan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervise dan konsultasi serta pelaksanaan penyelenggaraan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan pemrosesan ijin berdasarkan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya tertib hukum (legalitas) bagi penanaman modal.

BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN

(1) Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian

Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, bahan perumusan kebijakan teknis, bahan perumusan materi fasilitasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi serta pengoordinasian penyelenggaraan, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pengendalian penanaman modal guna terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah dan tertibnya pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Kepala Sub bidang Pembinaan dan Pengkajian

Kepala Sub bidang Pembinaan dan Pengkajian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan , advokasi, supervise, dan konsultasi serta pelaksanaan penanaman modal guna terkendalinya kegiatan usaha/penanaman modal.

(3) Kepala Subbidang Informasi dan Pengaduan

Kepala Subbidang Informasi dan Pengaduan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi serta pelaksanaan penyelenggaraan, evaluasi pembinaan dan pengawasan yang berkaitan dengan pemberian informasi data perkembangan penanaman modal, pemberian ijin, regulasi dan pengaduan penyimpangan penggunaan ijin penanaman modal guna terwujudnya citra daerah yang kondusif terhadap penanaman modal.

Jumlah pegawai yang ada di BPMPP Kabupaten Banyumas kondisi sampai dengan bulan Desember 2015 ada Pegawai BPMPP Kabupaten Banyumas menurut Golongan, Jenis Kelamin dan Pendidikan:

| No. | Gol. | Jenis Kelamin | | | Pendidikan | | | | | | |
|-----|------------------|---------------|-----------|-----------|------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | | L | P | JML | SD | SLTP | SLTA | D3 | S1 | S2 | JML |
| 1. | IV | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 2. | III | 12 | 13 | 25 | 0 | 0 | 7 | 2 | 15 | 1 | 25 |
| 3. | II | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 4. | I | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | JML | 28 | 17 | 45 | 3 | 1 | 15 | 2 | 15 | 9 | 45 |
| 5. | PTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | JML TOTAL | 28 | 17 | 45 | 3 | 1 | 15 | 2 | 15 | 9 | 45 |

Jumlah pegawai yang ada di BPMPP Kabupaten Banyumas kondisi sampai dengan bulan Desember 2015 ada Pegawai BPMPP Kab.Banyumas menurut Eselon:

| IV B | IV A | III B | III A | II B | II A |
|------|------|-------|-------|------|------|
| 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 |

C. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN LKJIP

Dengan diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP tersebut disusun berdasarkan dokumen perencanaan dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan LKjIP Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas tahun 2015 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi, misi dan rencana kinerja tahun 2015. LKjIP juga dimaksudkan sebagai umpan balik untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas serta mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (good governance).

D. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LKjIP

1. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme , sebagai tindak lanjut dari Tap MPR.
3. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
5. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
6. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja.
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAKIP BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN BANYUMAS

Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanaman Modal Kabupaten Banyumas tahun 2015, adalah sebagai berikut:

| | |
|---------|--|
| Bab I | Pendahuluan |
| | Tugas pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas, |
| | Latar belakang penyusunan LKjIP |
| | Dasar Hukum Penyusunan LKjIP BPMPP Kab. Banyumas |
| | Sistematika Penyusunan LKjIP |
| Bab II | Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja tahun 2015 |
| Bab III | Akuntabilitas Kinerja |
| | Akuntabilitas Keuangan. |
| Bab IV | Penutup |

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Kinerja

Rencana kinerja dapat didefinisikan sebagai analisis dan pengambilan keputusan di depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa datang. Menurut SK Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003, Perencanaan Kinerja diartikan sebagai proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan .

Perencanaan kinerja tahun 2015 disusun berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode Tahun 2013-2018 dan Rencana Strategis Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 dan mengacu pula pada Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra SKPD merupakan penjabaran dari visi misi dan program Kepala SKPD yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Visi Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas sebagai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang penanaman modal di Kabupaten Banyumas sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana tertera dalam RENSTRA Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas periode tahun 2013-2018 dengan Visi *”Terwujudnya Pelayanan Penanaman Modal Untuk Mendukung Kabupaten Banyumas Yang Berdaya Saing.”*

Untuk mewujudkan Visi tersebut di jabarkan dalam Misi Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas adalah :

Misi BPMPP Kabupaten Banyumas adalah:

- Meningkatkan kualitas pelayanan Penanaman Modal
- Meningkatkan daya tarik penanaman modal dan pengembangan kerjasama lintas stakeholders;
- Meningkatkan Pengendalian dan pengembangan Penanaman Modal

Visi dan Misi Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam 3 tujuan dan

3 sasaran yang akan dicapai melalui penetapan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan serta penentuan prioritas pembangunan daerah. Adapun arah kebijakan Badan Penanaman Modal Kabupaten Banyumas adalah Peningkatan Investasi daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Banyumas.

Sedangkan tujuan dan sasaran beserta indikator kinerjanya adalah sebagai berikut:

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja |
|----|--|---|---|
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal dan perizinan | Terwujudnya pelayanan penanaman modal dan perizinan yang prima, mudah, cepat, dan transparan | 1. Peningkatan Pelayanan perizinan 2. Mekanisme perizinan 3. Sosialisasi Penanaman Modal 4. Kajian prosedur pelayanan |
| 2. | Meningkatkan investasi dan peluang kerjasama investasi untuk meningkatkan lapangan kerja | Terbangunnya Kerjasama Penanaman Modal dan meningkatkan investasi serta tersediannya Data informasi peluang investasi | 1. Peningkatan romosi investasi 2. Peningkatan kerjasama Penanaman Modal dengan Stakeholders 3. Penyiapan potensi sumberdaya prasarana daerah |
| 3 | Meningkatkan nilai dan iklim investasi | Terpantaunya Pengembangan dan pengendalian penanaman modal | 1. Peningkatan nilai investasi |

Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.

Adapun kebijakan yang diambil untuk tercapainya tujuan dan sasaran BPMPP yang tertuang dalam RPJMD dan Renstra BPMPP Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2018 adalah:

- Membangun daya tarik investasi dan memberikan peluang-peluang investasi daerah pada bidang-bidang yang menjadi unggulan daerah untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja.
- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota lainnya guna pengembangan investasi, promosi investasi, pelayanan investasi dan pengawasan pelaksanaan investasi yang berdaya saing.

Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET 2015 | |
|-----|--|---|--|------|
| 1 | Pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran fisik maupun non fisik | Terpenuhinya kebutuhan ketatausahaan . | 12 bulan | 100% |
| 2 | Terwujudnya pelayanan penanaman modal dan perizinan yang prima, mudah, cepat, dan transparan | Terwujudnya legalitas untuk kegiatan usaha | 3500 SK IZIN | 100% |
| | | Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang penanaman modal | 4 kali kegiatan sosialisasi 27 Kecamatan | 100% |

| | | | | |
|---|---|---|---|------|
| | | Tewujudnya prosedur pelayanan perizinan yang lebih sederhana | 1 dokumen kajian | 100% |
| | | Peningkatan pemahaman legalitas aparatur pelayanan dan sinkronisasi BPMPP dengan apartur pelayanan di kecamatan | 27 Kecamatan | 100% |
| | Terbangunnya Kerjasama Penanaman Modal dan meningkatkan investasi serta tersediannya Data informasi peluang investasi | Terlaksananya koordinasi dan kerjasama penanaman modal pemerintah dengan dunia usaha | 2 (dua) kali temu usaha 100 UMKM | 100% |
| | | Terlaksananya pameran promosi investasi dan media sarana promosi | 3 (tiga) kali promosi Investasi & 1 Paket Media Promosi | 100% |
| | | Tersedianya data potensi/peluang investasi | 1 (satu) dokumen potensi/peluang investasi daerah 300 buku | 100% |
| 3 | Terpantaunya Pengembangan dan pengendalian penanaman modal | Terlaksananya kegiatan pengendalian penanaman modal | 12 bulan dengan nilai realisasi investasi RP. 235.000.000.000 | 100% |

B. Perjanjian Kinerja.

Pada awal tahun setelah penetapan anggaran tahun 2015 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan telah melakukan perjanjian kinerja antara Kepala SKPD dengan Bupati Banyumas melalui penyusunan dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja (Tapkin / PK) dengan memperhatikan kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan, baik sumber daya aparatur, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana, kondisi masyarakat dan daya dukung lingkungan serta berdasarkan pada perencanaan strategis tahun 2013-2018.

Rincian penetapan kinerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas tahun 2015 adalah dapat dilihat pada tabel Penetapan kinerja sebagai berikut :

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHTAHUN 2015**

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Program/Kegiatan | Anggaran Sebelum perubahan (Rp.) | Anggaran Sesudah perubahan (Rp.) |
|--|---|--------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.155.750.000 | 1.355.750.000 |
| | Terpenuhinya Sarana dan Prasarana kantor BPMPP Kab.Banyumas dalam rangka meningkatkan pelayanan sesuai dengan tupoksi selama 12 Bulan | 12 Bulan 100% | 1. Ketatausahaan | 1.155.750.000 | |
| | | | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 375.000.000 | 445.000.000 |
| Terwujudnya pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan yang prima, mudah cepat dan transparan | Terwujudnya legalitas untuk usaha | 3.500 SK Izin | 1. Mekanisme Perizinan | 150.000.000 | 200.000.000 |
| | Meningkatnya pengetahuan Masyarakat tentang penanaman modal dan perizinan | 4 Kali sosialisasi 27 Kecaatan | 2. osialisasi Penanaman Modal | 75.000.000 | 75.000.000 |
| | Terwujudnya prosedur pelayanan perizinan yang sederhana | 2 Dokumen Prosedur pelayanan | 3. Kajian Prosedur Pelayanan | 75.000.000 | 75.000.000 |
| | Peningkatan pemahaman aparatur pelayanan dan sinkronisasi antara BPMPP dengan Aparatur pelayanan di kecamatan | 27 Kecamatan | 4. Peningkatan Pelayanan Perizinan | 75.000.000 | 95.000.000 |

| | | | | | |
|---|---|---|--|----------------------|----------------------|
| Terbangunnya kerjasama penanaman modal dan Peningkatan investasi serta tersedianya data informasi peluang investasi | | | Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi | 300.000.000 | 300.000.000 |
| | Terlaksananya koordinasi dan kerjasama penanaman modal. | 2 kali temu usaha 100 UMKM | 1. Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha. | 100.000.000 | 100.000.000 |
| | Terlaksananya pameran/promosi dan media/sarana promosi investasi. | - 3 kali promosi Investasi - 1 paket media promosi Investasi | 2 Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Investasi | 200.000.000 | 200.000.000 |
| | | | Program Penyiapan Potensi dan Sumber daya Sarana prasarana | 50.000.000 | 50.000.000 |
| | Tersedianya data potensi/peluang investasi | 1 (satu) dokumen potensi/peluang investasi daerah. | 1. Penyusunan buku profil potensi/peluang investasi | 50.000.000 | 50.000.000 |
| Terpantaunya pengembangan dan pengendalian penanaman modal | | | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | 50.000.000 | |
| | Terlaksananya kegiatan pengendalian penanaman modal | 12 bulan, 27 kecamatan | 1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | 50.000.000 | |
| TOTAL BELANJA LANGSUNG | | | | 1.930.750.000 | 2.200.750.000 |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA BPMPK KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2015

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses tersebut dilaksanakan dengan mengukur capaian setiap indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Untuk lebih menggambarkan keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

| Skala | Kategori |
|----------------|-----------------------------|
| 91 s/d 100 | Sangat Berhasil/sangat baik |
| 71 s/d 90 | Cukup Berhasil/cukup baik |
| 55 s/d 70 | Kurang Berhasil/kurang baik |
| Kurang dari 55 | Tidak Berhasil/tidak baik |

Indikator kinerja sasaran bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penanaman modal pelayanan perijinan yang meliputi aspek pelayanan umum administrasi perkantoran, aspek peningkatan kualitas pelayanan penanam modal dan perijinan, aspek peningkatan investasi dan peluang kerjasama investasi untuk meningkatkan lapangan kerja dan aspek peningkatan iklim investasi. Hasil pengukuran indikator kinerja Badan Penanaman Modal dan perijinan tahun 2015 adalah sebagai berikut :

| PROGRAM DAN KEGIATAN | PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 | | | | CAPAIAN % |
|--|---|--------|-----------------|-----------------|-----------|
| | INDIKATOR | SATUAN | RENCANA | REALISASI | |
| I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | |
| 1. Ketatausahaan | INPUT: | | | | |
| | - Dana | Rupiah | 1.355.750.000,- | 1.102.161.018,- | 81 |

| | | | | | |
|--|--|----------|---------------|---------------|------------|
| | OUTPUT | | | | 100 |
| | Terlaksananya operasional pelayanan administrasi per kantor 1 tahun. | Bulan | 12 | 12 | 100 |
| | OUTCOME | | | | 100 |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran (%). | Bulan | 12 | 12 | 100 |
| II. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | | | | | |
| 1. Mekanisme Perijinan | INPUT | | | | |
| | Dana | Rupiah | 200.000.000,- | 184.404.321,- | 89 |
| | OUTPUT | | | | 95 |
| | Pelaksanaan Operasional kegiatan penerbitan SK ijin | SK | 3500 | 4.713 | 135 |
| | OUTCOME | | | | |
| | Terwujudnya legalitas untuk kegiatan usaha | SK | 3500 | 4.713 | 135 |
| 2. Sosialisasi Penanaman Modal | | | | | |
| | INPUT | | | | 97 |
| | Dana | Rupiah | 75.000.000,- | 32.966.150,- | 44 |
| | OUTPUT | | | | 100 |
| | - Terlaksananya sosialisasi penanaman modal | kegiatan | 4 | 5 | 125 |
| | OUTCOME | | | | |
| | Meningkatnya pengetahuan masyarakatnya tentang penanaman modal dan perijinan | kegiatan | 4 | 5 | 125 |

| | | | | | |
|---|---|-----------|---------------|--------------|------------|
| Kajian Prosedur Pelayanan | INPUT | | | | |
| | Dana | Rupiah | 75.000.000,- | 35.319.175 | 47 |
| | OUTPUT | | | | 96 |
| | Terlaksananya kegiatan kajian prosedur pelayanan | Dokumen | 3 | 4 | 125 |
| | | | | | |
| | OUTCOME | | | | |
| | Terwujudnya prosedur pelayanan yang lebih sederhana | Dokumen | 3 | 4 | 125 |
| Peningkatan pelayanan perijinan | INPUT | | | | |
| | Dana | Rupiah | 95.000.000 | 79.518.765,- | 84 |
| | OUTPUT | | | | |
| | Pelaksanaan pemberian konsultasi (advising) perijinan kepada pelaku usaha dan peningkatan kemampuan teknis aparatur pelaksana perijinan BPMPP dan Kecamatan | Kecamatan | 27 | 27 | 100 |
| | OUTCOME | | | | |
| | Terwujudnya peningkatan pemahaman legalitas perijinan bagi masyarakat pelaku usaha dan aparatur pelaksana perijinan BPMPP dan kecamatan | Kecamatan | 27 | 27 | 100 |
| Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi | | | | | 102 |
| Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan | INPUT | | | | |
| | Dana | Rupiah | 100.000.000,- | 86.423.950,- | 86 |
| | OUTPUT | | | | |
| | Terselenggaranya Temu usaha Lintas stakeholders | Kegiatan | 2 | 2 | 100 |

| | | | | | |
|--|--|---------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| Dunis Usaha | OUTCOME | Orang | | | |
| | Terbangunnya komunikasi dan kerjasama antara instansi pemerintah dan dunia usaha | kegiatan | 2 | 2 | 100 |
| Penyelenggaraan Promosi Investasi | INPUT | | | | |
| | Dana | Rupiah | 200.000.000 | 194.732.500 | 79 |
| | OUTPUT | | | | 100 |
| | Pelaksanaan pameran dan pembuatan sarana promosi investasi | kegiatan pameran | 3 | 4 | 125 |
| | OUTCOME | | | | 124 |
| | Terlaksananya pameran dan sarana promosi investasi | kegiatan pameran | 3 | 4 | 125 |
| Prpgram Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | | | | | |
| 1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan | INPUT | | | | |
| | Dana | Rupiah | 50.0000.000 | 46.251.700 | 93 |
| | OUTPUT | | | | |
| | Terlaksananya kegiatan monitoring , evaluasi, dan pelaporan penanaman modal | Nilai ivestasi (milyar) | 235.000.000.000 | 607.283.645.592 | 258 |
| | OUTCOME | | | | |
| Terwujudnya kegiatan penaman modal | | 2325.000.000.000 | 607.283.645.592 | 258 | |
| Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah | | | | | |
| Penyusunan buku profil potensi / peluang investasi | INPUT | | | | |
| | Dana | Rupiah | 50.000.000,- | 45.130.200 | 90 |
| | OUTPUT | | | | |
| Terdokumentasi nya profil / | buku | 300 | 300 | 100 | |

| | | | | | |
|--|--|------|----------------------|----------------------|-----------|
| | peluang investasi daerah | | | | |
| | OUTCOME | | | | |
| | Tersusunnya buku profil / peluang investasi daerah, tersedianya potensi dan data peluang, sarana prasarana | buku | 300 | 300 | 100 |
| Rata-rata jumlah APBD untuk program/kegiatanTA 2015 | | | 2.200.750.000 | 1.806.907.779 | 82 |

Adapun hasil pengukuran diatas maka dapat direkapitulasi capaian kinerja yang hanya terbatas pada pemantauan atau pengukuran indikator kegiatan input, output saja tapi melihat outcome dan di hitung secara keseluruhan pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran sebagai berikut:

REKAPITULASI CAPAIAN AKHIR RIALISASI KEGIATAN TAHUN 2015

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | TOLAL REALISASI INDIKATOR (%) | | KETERANGAN |
|--|---|-------------------------------|-----------|-------------|
| Program pelayanan administrasi perkantoraan | | | | 93 |
| 1 | Ketatausahaan | Input | 81 | Sangat baik |
| | | Output | 100 | |
| | | Outcame | 100 | |
| Capaian | | 93 | | |
| Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | | | | 102 |
| 1 | Mekanisme Perijinan | Input | 89 | Sangat baik |
| | | Output | 135 | |
| | | Outcame | 135 | |
| Capaian | | 119 | | |
| 2 | Sosialisasi penanaman modal | Input | 44 | Sangat baik |
| | | Output | 125 | |
| | | Outcame | 125 | |
| Capaian | | 98 | | |
| 3 | Kajian Prosedur pelayanan | Input | 47 | Sangat baik |
| | | Output | 125 | |
| | | Outcame | 125 | |
| Capaian | | 99 | | |
| 4 | Peningkatan pelayanan perijinan | Input | 84 | Sangat baik |
| | | Output | 100 | |
| | | Outcame | 100 | |
| Capaian | | 94 | | |
| Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi | | | | 102 |
| 6 | Peningkatan Koordinasi dan kerjasama di | Input | 86 | |

| | | | | |
|---|--|---------|------------|--------------------|
| | bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha | Output | 100 | |
| | | Outcame | 100 | |
| | Capaian | | 95 | Sangat baik |
| 7 | Penyelenggaraan Promosi Investasi | Input | 79 | |
| | | Output | 125 | |
| | | Outcame | 125 | |
| | Capaian | | 109 | Sangat baik |
| | Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah | | | 96 |
| 8 | Penyusunan buku profil | Input | 90 | |
| | | Output | 100 | |
| | | Outcame | 100 | |
| | Capaian | | 96 | Sangat baik |
| | Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi | | | 203 |
| 9 | Monitoring, Evaluasi dan pelaporan | Input | 93 | |
| | | Output | 258 | |
| | | Outcame | 259 | |
| | Capaian | | 203 | Sangat baik |
| | CAPAIAN KINERJA KESELURUHAN | | 119 | Sangat Baik |

Penghitungan capaian kinerja pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas pada Tahun 2015 dari **5 program** dengan **9 kegiatan** dapat dikategorikan **Sangat Baik** dengan skor nilai **100**

CAPAIAN TARGET KINERJA BERDASARKAN PEMBANDINGAN DENGAN RKPD 2015.

Capaian kinerja berdasarkan RKPD Kabupaten Banyumas dalam penyelenggaraan urusan dibidang penanaman modal pelayanan perijinan yang meliputi aspek pelayanan umum administrasi perkantoran, aspek peningkatan kualitas pelayanan penanamam modal dan perijinan, aspek peningkatan investasi dan peluang kerjasama investasi untuk meningkatkan lapangan kerja dan aspek peningkatan iklim investasi. Hasil pengukuran indicator kinerja Badan Penanaman Modal dan perijinan tahun 2015 adalah sebagai berikut :

| NO | INDIKATOR KINERJA / KONDISI | TAHUN 2015 | |
|----|---|-----------------|----------------|
| | | TARGET (%) | REALISASI (%) |
| 1. | Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran selama 12 bulan (100%) | 12 bulan (100%) | 12 bulan (99%) |
| 2. | Terwujudnya legalitas untuk kegiatan usaha | 3500 SK | 4713 SK |
| 3 | Meningkatnya pengetahuan masyarakatnya tentang penanaman modal dan perijinan | 4 kegiatan | 5 kegiatan |
| 4 | Terwujudnya prosedur pelayanan | 3 Dokumen | 4 Dokumen |

| | | | |
|----|--|-----------------|-------------------|
| | yang lebih sederhana | | |
| 5 | Terwujudnya peningkatan pemahaman legalitas perijinan bagi masyarakat pelaku usaha dan aparaturnya pelaksana perijinan BPMPP dan kecamatan | 27 Kecamatan | 27 Kecamatan |
| .6 | Terbangunnya komunikasi dan kerjasama antara instansi pemerintah dan dunia usaha | 2 kegiatan | 2 kegiatan |
| 7 | Terlaksananya pameran dan sarana promosi investasi | 3 kali pameran | 4 kali pameran |
| 8. | Terlaksananya kegiatan monitoring , evaluasi, dan pelaporan penanaman modal | 235.000.000.000 | 607.283.645.592,- |
| 9. | Tersusunnya buku profil / peluang investasi daerah, tersedianya potensi data peluang, sarana prasarana | 300buku | 300 buku |

CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PEMBANDINGAN TARGET PERJANJIAN KINERJA 2015.

Sedangkan gambaran keberhasilan capaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Penanaman Modal Pelayanan dan Perijinan direpresentasikan berdasarkan capaian **Perjanjian kinerja**, adalah sebagai berikut :

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi |
|---|--|--------------------|--------------------|
| Pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran fisik maupun non fisik | Terpenuhinya kebutuhan ketatausahaan 12 bulan. | 100% | 99,9% |
| Terwujudnya pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan yang prima, | - Terwujudnya legalitas untuk usaha | 3500 SK | 4713 SK |
| | - Meningkatnya pengetahuan Masyarakat tentang penanaman modal dan perizinan | 4 kali sosialisasi | 4 kali sosialisasi |
| | - Terwujudnya prosedur pelayanan perizinan yang sederhana | 2 Dokumen | 2 Dokumen |
| | - Peningkatan pemahaman aparaturnya pelayanan dan sinkronisasi antara BPMPP dengan Aparatur pelayanan di kecamatan | 27 kecamatan | 27 Kecamatan |
| Terbangunnya kerjasama penanaman | Terlaksananya koordinasi dan kerjasama penanaman modal. | 2 kali temu | 2 kali |

| | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|
| modal dan Peningkatan investasi serta tersedia data informasi peluang investasi | | usaha | temua usaha |
| | Terlaksananya pameran/promosi dan media/sarana promosi investasi. | 3 kali pameran | 4 kali pameran |
| | Tersedianya data potensi/peluang investasi | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| Terpantaunya pengembangan dan pengendalian penanaman modal | Terlaksananya kegiatan pengendalian penanaman modal | 12 bln, 27 Kecamatan | 12 bln, 27 Kecamatan |

Hasil capaian sasaran dan capaian indikator kegiatan untuk mencapai tujuan dalam rangka mewujudkan visi misi BPMPP dengan capaian **Indikator Kinerja Utama** (IKU) dapat dilihat sebagai berikut:

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | Capaian | Kategori |
|----|--|---|--|---------|-------------|
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal dan perizinan | Terwujudnya pelayanan penanaman modal dan perizinan yang prima, mudah, cepat, dan transparan | 1. Peningkatan Pelayanan perizinan 2. Mekanisme perizinan 3. Sosialisasi Penanaman Modal 4. Kajian prosedur pelayanan | 102 | Sangat Baik |
| 2 | Meningkatkan investasi dan peluang kerjasama investasi untuk meningkatkan lapangan kerja | Terbangunnya Kerjasama Penanaman Modal dan meningkatkan investasi serta tersediannya Data informasi peluang investasi | 4. Peningkatan promosi investasi 5. Peningkatan kerjasama Penanaman Modal dengan Stakeholders | 102 | Sangat baik |
| 3 | Meningkatkan nilai dan iklim | Terpantaunya Pengembangan | 2. Peningkatan nilai | 203 | Sangat baik |

| | | | | | |
|--|-----------|-------------------------------------|-----------|------------|--------------------|
| | investasi | dan pengendalian penanaman modal | investasi | | |
| | | | | | |
| Rata – rata capaian kinerja sasaran | | | | 135 | Sangat baik |

PENGUKURAN KINERJA PADA PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 DENGAN PEMBANDINGAN TAHUN 2014

| No | Indikator | Target | Realisasi | | Capaian % | Kenaikan / Penurunan |
|----|---|--|--|---|-----------|----------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran selama 12 bulan (100%) | 12 bulan (100%) | 12 bulan (99,5%) | 12 bulan (100 %) | 99% | -1 |
| 2. | Terwujudnya legalitas untuk kegiatan usaha | 3500 SK IZIN | 4.713 SK (135 %) | 4.447 SK (127%) | 134 | -7,6 |
| 3 | Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang penanaman modal | 4 kali kegiatan sosialisasi 27 Kecamatan | 5 kali kegiatan (102 %) | 4 Kali Kegiatan | 125 | 25 |
| 4 | Tewujudnya prosedur pelayanan perizinan yang lebih sederhana | 1 dokumen kajian | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 200 | 200 |
| 5 | Peningkatan pemahaman legalitas aparatur pelayanan dan sinkronisasi BPMPP dengan apartur pelayanan di kecamatan | 27 Kecamatan | 27 Kecamatan | 27 Kecamatan | 100 | 100 |
| .6 | Terlaksananya koordinasi dan kerjasama penanaman modal pemerintah dengan dunia usaha | 2 (dua) kali temu usaha 100 UMKM | 2 kali temu usaha | 2 kali temu usaha | 100 | 100 |
| 8. | Terlaksananya pameran promosi investasi dan media sarana promosi | 3 (tiga) kali promosi Investasi & 1 Paket Media Promosi | 3 (tiga) kali promosi Investasi & 1 Paket Media Promosi | 4 (empat) Pameran | 100 | -33 |
| 9. | Tersedianya data potensi/pejuang investasi | 1 (satu) dokumen potensi/pejuang investasi daerah 300 buku | 1 (satu) dokumen potensi/pejuang investasi daerah 300 buku | 1 (satu) dokumen potensi/pejuang investasi daerah | 100 | 100 |

| | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|-----|-----|
| | | | | 300 buku | | |
| 10. | Terlaksananya kegiatan pengendalian penanaman modal | 12 bulan dengan nilai realisasi investasi RP. 235.000.000.000 | 12 bulan dengan nilai realisasi investasi RP. 605.935.145.592 | 12 bulan dengan nilai realisasi investasi RP. 236.321.440.329 | 257 | 157 |

B. ANALISIS HASIL PENGUKURAN KINERJA

Analisis atas capaian setiap indikator kinerja kegiatan bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mewujudkan misi dan visi yang telah dituangkan dalam dokumen RENSTRA, sehingga dapat digunakan untuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Analisis tersebut dilakukan dengan membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan penetapan target tahun berjalan dan target akhir dalam RENSTRA, perbandingan dengan realisasi tahun lalu serta analisis atas perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadibaik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Uraian hasil analisis atas capaian setiap indikator kinerja untuk mengetahui kemajuan dan kendala pencapaian tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi dalam Rencana Strategis BMPP Kabupaten Banyumas pada tahun 2015, maka dari 3 misi tersebut adalah yaitu :

- Meningkatkan kualitas pelayanan Penanaman Modal
- Meningkatkan daya tarik penanaman modal dan pengembangan kerjasama lintas stakeholders;
- Meningkatkan pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal

Visi dan Misi Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam 3 tujuan dan 3 sasaran yang akan dicapai melalui penetapan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan serta penentuan prioritas pembangunan daerah. Adapun arah kebijakan Badan Penanaman Modal Kabupaten Banyumasa dalah Peningkatan Investasi daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Banyumas.dengan 3 (tiga) sasaran yaitu

1. Terwujudnya pelayanan penanaman modal dan perizinan yang prima, mudah, cepat, dan transparan
2. Terbangunnya Kerjasama Penanaman Modal dan meningkatkan investasi serta tersediannya Data informasi peluang investasi
3. Terpantaunya Pengembangan dan pengendalian penanaman modal

Dari 3 (tiga) sasaran diwujudkan dengan program, capaian kinerja program sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoraan 93 % dengan 1 (satu) kegiatan
2. Program peningkatan kualitas pelayanan public 102 % dengan dengan 4 (empat) kegiatan

3. Program peningkatan promosi dan kerjasama 102 % dengan 2 kegiatan
4. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi 203 % dengan 1 (satu) kegiatan
5. Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah 96 % dengan 1 (satu) kegiatan

Gambaran capaian sasaran tersebut diukur dengan indicator kinerja pada penetapan kinerja / perjanjian kinerja yaitu dengan analisis hasil capaian yang ada pada table diatas) maka sampai tahun 2015 capaian kinerja sasaran dari 3 (tiga) sasaran kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Terwujudnya pelayanan penanaman modal dan perizinan yang prima, mudah, cepat, dan transparan dengan rata – rata capaian 102 % (sangat baik) capaian tersebut diukur dari 4 (empat) indikator dan indikator yang melebihi target adalah indikator mekanisme perijinan dengan total capaian 119 % yang dipengaruhi dengan penerbitan SK perijinan dari target 3500 SK menjadi 4713 SK yang terbit.
2. Terbangunnya Kerjasama Penanaman Modal dan meningkatkan investasi serta tersediannya Data informasi peluang investasi dengan rata – rata capaian 102 % (sangat baik) capaian tersebut diukur dari 2 (dua) indikator dan indikator yang melebihi target adalah indikator peningkatan promosi investasi dengan total capaian 125 % yang dipengaruhi dengan pameran yang dilaksanakan melebihi target dari 3 kali pameran menjadi 4 kali kegiatan
3. Terpantaunya Pengembangan dan pengendalian penanaman modal dengan rata rata capaian 203 % (sangat baik) capaian tersebut diukur dari 1 (satu) indikator yang melebihi target yang dipengaruhi dengan nilai investasi dari target Rp. 235.000.000.000,- menjadi Rp. 607.283.645.592,-

Sedangkan untuk mewujudkan RPJM 2013 – 2018 yaitu dengan meningkatnya nilai investasi yang di dukung dengan pelaksanaan program Peningkatan iklim nilai investasi dan realisasi investasi dengan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

DATA CAPAIAN TARGET RPJMD 2013-2018

| NO | Urusan Wajib | Kinerja Indikator | Target RPJM s/d 2018 | Capain kinerja RKPD 2014 | | Capain kinerja RKPD 2015 | |
|----|--------------------|--|-------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| | | | | Target 2014 | Capaian 2014 | Target 2015 | Capaian 2015 |
| | PENANAMAN MODAL | 1. Jumlah Investor berskala nasional | 600 | 560 | 927 | 570 | 1.123 |
| | | 2. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) | 250.000.000.000 | 235.000.000.000 | 360.321.440.000 | 235.000.000.000 | 607.283.645.592 |
| | | 3. Rasio daya serap tenaga kerja | 13 % | 10 | 11 | 11 | 12 |
| | | 4. Lama proses perijinan | 14 hari | 14 hari | 14 hari | 14 hari | 14 hari |

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Rencana Belanja BPMPP Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2015 setelah Perubahan sebesar Rp. 2.200.750.000 terealisasi sebesar Rp. 1.806.907.779 atau 82,10%.

Rincian Anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

| No | Uraian | Anggaran RP | Realisasi RP | % |
|-----------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| I | Target Pendapatan dan Realisasi | 4.325.000.000 | 4.317.369.230 | 99,82 |
| | Pendapatan dari Retribusi Penerbitan SK Izin | 4.325.000.000 | 4.317.369.230 | 99,82 |
| II | Belanja | 2.200.750.000 | 1.806.907.279 | 82,10 |
| | Belanja Pegawai | 161.157.500 | 154.050.500 | 95,6 |
| | Belanja Barang dan jasa | 1.862.746.650 | 1.485.086.479 | 79,72 |
| | Belanja Modal | 176.845.850 | 167.770.800 | 94,86 |

Sedangkan biaya yang dibutuhkan dalam mewujudkan sasaran terinci dalam anggaran dan realisasi per program/kegiatan adalah sebagai berikut:

| NO. | PROGRAM | KEGIATAN | ANGGARAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | % Penyerapan |
|-----------|--|--|--------------------|--------------------|-----------------|
| 1. | Pelayanan Administrasi Perkantoran | | 1.355.750.000 | 1.102.161.018 | 81,30 |
| | | 1. Ketatausahaan | 1.355.750.000 | 1.102.161.018 | 81,30 |
| 2. | Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | | 300.000.000 | 281.156.450 | 93,72 |
| | | 1. Penyelenggaraan Promosi Investasi | 200.000.000 | 194.732.500 | 97,37 |
| | | 2. Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di bidang Penanaman Modal dengan Instansi | 100.000.000 | 86.423.950 | 86,42 |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|---|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | sipemerintah dan Dunia Usaha | | | |
| 3. | Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi | | | 50.000.000 | 46.251.700 | 92,50 |
| | | 1 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | 50.000.000 | 46.251.700 | 92,50 |
| 4 | Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Saran dan Prasarana Daerah | | | 50.000.000 | 45.130.200 | 90,26 |
| | | 1 | Penyusunan Buku Profil Potensi/Peluang Investasi Daerah | 50.000.000 | 45.130.200 | 90,26 |
| 5 | Program Peningkatan Pelayanan Perizinan | | | 445.000.000 | 332.208.411 | 74,65 |
| | | 1 | Mekanisme Perizinan | 200.000.000 | 184.404.321 | 92,20 |
| | | 2 | Sosialisasi Penanaman Modal | 75.000.000 | 32.966.150 | 43,95 |
| | | 3 | Kajian Prosedur Pelayanan | 75.000.000 | 35.319.175 | 47,09 |
| | | 4 | Peningkatan Pelayanan Perizinan | 95.000.000 | 79.518.765 | 83,70 |
| TOTAL ANGGARAN | | | | 2.200.750.000 | 1.806.907.779 | 82,10 |

Keterangan :

Realisasi keuangan sampai dengan bulan Desember 2015 adalah sebesar Rp. **1.806.907.779,-** (Satu milyar delapan ratus enam juta sembilan ratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dari target sebesar Rp. **2.200.750.000,-** (Dua milyar dua ratus juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau terealisasi sebesar 82,10% (delapan puluh dua koma sepuluh persen), rata-rata realisasi fisik 100 % (seratus persen), dengan keterangan sebagai berikut:

1. Kegiatan Ketatausahaan, anggaran sebesar Rp. 1.355.750.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.102.161.018,- atau 81,30%, dengan realisasi fisik 100%, hal tersebut terjadi dikarenakan adanya efisiensi anggaran di belanja barang cetakan dan belanja pemeliharaan peralatan kantor dan kendaraan.
2. Kegiatan peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal Dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha (temu usaha), anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 86.423.950,- atau 86,42%, sedangkan realisasi fisik 100%. Efisiensi anggaran tersebut dari dikarenakan adanya

tempat penyelenggaraan sederhana dan konsumsi yang sesuai dengan standar, serta perjalanan dinas sesuai dengan keperluan.

3. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Investasi, anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 194.732.500,- atau 97,37%, adapun realisasi fisik 133%.
4. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan , anggaran sebesar Rp.50.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 46.251.700,- atau 92,50%, sedangkan realisasi fisik 250%. Kegiatan Penyusunan Buku Profil Potensi / Peluang Potensi Daerah, anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 45.130.200,- atau 90,26%, sedangkan realisasi fisik 100 %.
5. Kegiatan Penyusunan Buku Profil Potensi / Peluang Potensi Daerah, anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 45.130.200,- atau 90,26%, sedangkan realisasi fisik 100 %.
6. Kegiatan Mekanisme Perizinan, anggaran sebesar Rp. 200.000.000,-realisasi keuangan sebesar Rp. 162.428.381,- atau 81%, adapun realisasi fisik 127%.
7. Kegiatan Sosialisasi Penanaman Modal, anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 32.966.150,- atau 43,95%, adapun realisasi fisik 100%. Kegiatan sosialisasi dengan capaian kinerja 100% sementara anggaran yang terserap 43,95% hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran pada anggaran perjalanan dinas. Dan tempat penyelenggaraan di kantor sehingga tidak perlu sewa tempat.
8. Kegiatan Kajian Prosedur Perizinan, anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 35.319.175,- atau 47,09%, sedangkan realisasi fisik 300%. hal ini dikarenakan Efisiensi anggaran pada barang jasa, perjalanan dinas dan penggandaan.
9. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan, anggaran sebesar Rp. 95.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 79.518.765,- atau 83,70%, adapun realisasi fisik 100%.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanaman Modal Kabupaten Banyumas Tahun 2015 telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Badan Penanaman Modal Kabupaten Banyumas menyadari sekalipun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah dikembangkan sejak awal era reformasi dengan diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam penerapannya masih mengalami kendala karena pemahaman yang masih parsial, dan juga karena kesulitan mengubah paradigma untuk membangun manajemen pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented Government*).

Kesimpulan dan saran atas hasil pengukuran kinerja tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- Hasil yang diperoleh dari pengukuran Penetapan Kinerja Tahun 2015 dapat disimpulkan semua program dan kegiatan **BERHASIL**
- Capaian kinerja tertinggi ada pada sasaran program Peningkatan Pengendalian dan Pengembangan Penanaman Modal , *Capaian* ini disumbangkan oleh capaian indikator kinerja dari *Kegiatan Kajian Prosedur Pelayanan dan kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan yang diampu oleh bidang Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal*, dua kegiatan ini melampaui target yang sangat signifikan, Sedangkan capaian kinerja program dan kegiatan lainnya mencapai target namun tidak signifikan, namun secara garis besar semua program dan kegiatan telah mencapai target yang telah ditentukan.

Permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Masih adanya sebagian masyarakat pelaku usaha yang belum sadar untuk mengurus izin.
2. Masih adanya Peraturan Daerah yang belum mendukung terlaksananya pelayanan yang menunjang kegiatan usaha dan peluang iklim investasi berdasarkan kawasan yang disesuaikan dengan kondisi sekarang.

Pemecahan masalah:

1. Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya izin berusaha.
2. Peninjauan kembali terhadap regulasi baik merevisi maupun membuat regulasi baru untuk terciptanya Kabupaten Banyumas yang pro investasi.
3. Membuat dokumen Rencana Induk Pengembangan Penanaman Modal (RIPP)/blue print investasi sebagai pedoman dan arahan pengusaha dan pengembangan potensi dan kemampuan daerah pada bidang investasi/penanaman modal

Kesimpulan :

Dari total anggaran Rp. 2.200.750.000,- untuk 5 (lima) Program dan 9 (sembilan) kegiatan pada BPMPP Kabupaten Banyumas berhasil terserap sebesar Rp.1.806.907.779,- (82,10%), dengan target fisik rata-rata sebesar 100% maka secara garis besar semua kegiatan tercapai walau kenaikan secara prosentase kenaikannya tidak signifikan, namun dari segi anggaran mengalami efisiensi yang sangat baik sehingga dari 5 Program 9 kegiatan semua berjalan lancar mencapai 100%.

Purwokerto, Januari 2016

Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan
Kabupaten Banyumas



DRS. ASIS KUSUMANDANI, M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19630405 198503 1 021